



DS:7230-0218-9703-9189

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692077/2026**

Revisi ke 01

Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi	:	(34)	SULAWESI BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(692077)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
Sebesar	:	Rp. 1.289.098.000	(SATU MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Kode	Nama	Jumlah Uang
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.289.098.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 1.289.098.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	-	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	1.289.098.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU	(178) Rp.	1.289.098.000
----------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025

A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode/Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.289.098.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			1.289.098.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan	730.391.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4.00	layanan	730.391.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	11.450.000
Rincian Output	:	01	BCB.001 Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1.00	Perkara	11.450.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4,00	Lembaga	511.515.000
Rincian Output	:	01	BIC.001 Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	4.00	Lembaga	511.515.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	35.742.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1.00	Laporan	35.742.000

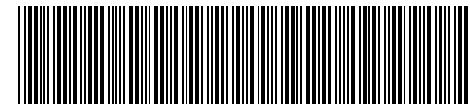
Jakarta, 01 Desember 2025
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
 WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026



DS:7230-0218-9703-9189

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode/Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : I B. 1

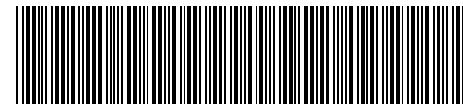
				Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.289.098.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp.		0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN US\$ 0 Rp.		0
2. PNBP	Rp.		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp.		0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0		0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri IDR 0		0	
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0		0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0			(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register	PAGU TAHUNINI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah	RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN			DANA PENDAMPING			
			1) PP	2) PL	3) RK	4) LC	5) -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026



DS:7230-0218-9703-9189

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : (34) SULAWESI BARAT

Kode/Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1

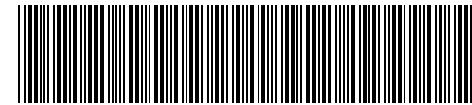
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692077	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT	-	1.289.098	-	-	-	1.289.098		
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.289.098	-	-	-	1.289.098		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.289.098	-	-	-	1.289.098		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	730.391	-	-	-	730.391	34 . 51	
04	PNBP	-	730.391	-	-	-	730.391	178@	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	11.450	-	-	-	11.450	34 . 51	
04	PNBP	-	11.450	-	-	-	11.450	178@	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	511.515	-	-	-	511.515	34 . 51	
04	PNBP	-	511.515	-	-	-	511.515	178@	
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	35.742	-	-	-	35.742	34 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026



DS:7230-0218-9703-9189

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : (34) SULAWESI BARAT

Kode/Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : II. 2

Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	35.742	-	-	-	35.742	178@	
	JUMLAH	-	1.289.098	-	-	-	1.289.098		

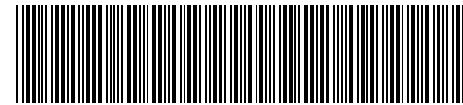
Jakarta, 01 Desember 2025
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
 WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026



DS:7230-0218-9703-9189

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : (34) SULAWESI BARAT

Kode/Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692077	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	80.189	117.369	154.283	138.238	152.541	121.865	175.138	153.340	79.066	51.653	65.416	1.289.098
		BELANJA BARANG	0	80.189	117.369	154.283	138.238	152.541	121.865	175.138	153.340	79.066	51.653	65.416	1.289.098
135.04.BF.7110		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	80.189	117.369	154.283	138.238	152.541	121.865	175.138	153.340	79.066	51.653	65.416	1.289.098
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	80.189	117.369	154.283	138.238	152.541	121.865	175.138	153.340	79.066	51.653	65.416	1.289.098

Jakarta, 01 Desember 2025

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

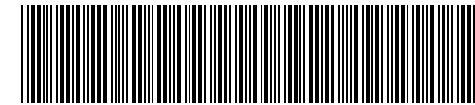
ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026

IV A. B L O K I R



DS:7230-0218-9703-9189

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : [34] SULAWESI BARAT

Kode dan Nama Satker : [692077] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692077	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 520.375 52 Belanja Barang Rp. 520.375		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.260 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.978 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.725 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.850 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.260 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.443 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.931	7110.BCB	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.354 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.254 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.990 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.594 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026
IV A. B L O K I R



DS:7230-0218-9703-9189

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
 Kode dan Nama Satker : [692077] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A.
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 177.500	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 210
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 1.080	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 25.513		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 1.786		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 21.065		
	7110.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 856		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	Rp. 11.701		

Jakarta, 01 Desember 2025

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026
IV B. C A T A T A N



DS:7230-0218-9703-9189

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : [34] SULAWESI BARAT

Kode dan Nama Satker : [692077] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO